

**PENGADAAN TANAH UNTUK PENGEMBANGAN KAMPUS  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DI KABUPATEN PADANG  
PARIAMAN**

**TESIS**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum*



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2024**

## **“PENGADAAN TANAH UNTUK PENGEMBANGAN KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI PADANG DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

**(Aidhil Suti Rahmi, 2020112022, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pembimbing I : Kurnia Warman dan Pembimbing II : Dahlil Marjon, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2024)**

### **ABSTRAK**

Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dalam bentuk luasnya wilayah kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu selaku anugerah Tuhan, selayaknyalah tanah tersebut digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pandangan sederhana tersebut berangkat dari luasnya wilayah Indonesia yang tersebar dari berbagai pulau-pulau yang ada. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berawal dari adanya rencana pengembangan Kampus UNP yang rencananya akan dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman. Rencana tersebut ditandai dengan surat permohonan dari Rektor UNP kepada Bupati Padang Pariaman melalui surat Nomor : 1784/UN35/2017 tanggal 19 April 2017 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Pendidikan. Sebagaimana dalam pokok surat yang berisi adanya permohonan dari pihak UNP sebagai Institusi Pendidikan yang memerlukan tanah untuk pengembangan Kampus UNP yang berada di luar Kota Padang tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman. Tetapi kemudian muncul permasalahan dalam proses hibah tanahnya, dikarenakan tanah tersebut adalah tanah aset yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan telah tercatat sebagai aset dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka tentu bagaimana kemudian peralihan terhadap aset daerah tersebut apakah diperlukan adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman atau tidak. Serta permasalahan klasik yang sering terjadi yaitu terhadap penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Adanya aktifitas pendudukan tanah oleh masyarakat baik secara ilegal maupun legal diatas bidang tanah yang akan dibangun oleh Kampus UNP juga perlu mendapat perhatian khusus, muaranya adalah berupa pendataan dan pemberian ganti kerugian terhadap tanaman maupun objek lain diatas bidang tanah tersebut. Upaya pemberian ganti kerugian terhadap masyarakat tersebut, tidak serta merta dapat langsung dilaksanakan oleh pihak Kampus UNP. Ada upaya atau tahapan yang harus dilalui dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pemberian ganti kerugian tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.

**Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Kampus UNP, Bentuk dan Besar ganti Kerugian.**

# **“LAND ACQUISITION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PADANG STATE UNIVERSITY CAMPUS IN PADANG PARIAMAN DISTRICT”**

**(Aidhil Suti Rahmi, 2020112022, Master of Law Study Program, Supervisor I: Kurnia Warman and Supervisor II : Dahlil Marjon, Faculty of Law, Andalas University, 2024)**

## **ABSTRACT**

Land is a gift from God Almighty to the Indonesian people in the form of the vast territory of the Indonesian archipelago. Therefore, as a gift from God, this land should be used to achieve just and equitable prosperity for the people throughout Indonesia. This simple view departs from the vast territory of Indonesia which is spread across various islands. In line with this, based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that the earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used as much as possible for the prosperity of the people. It started with a plan to develop the UNP Campus which was planned to be carried out in Padang Pariaman Regency. This plan was marked by a letter of application from the Chancellor of UNP to the Regent of Padang Pariaman via letter Number: 1784/UN35/2017 dated 19 April 2017 concerning Application for the Provision of Educational Land. As in the main letter which contains a request from UNP as an educational institution that requires land for the development of the UNP campus which is outside the city of Padang, precisely in Padang Pariaman Regency. But then problems arose in the land grant process, because the land is land assets controlled by the Padang Pariaman Regency Government and has been registered as an asset of the Padang Pariaman Regency Government, so of course what happens next when transferring these regional assets, whether approval from the Regional People's Representative Council is required. (DPRD) Padang Pariaman Regency or not. As well as the classic problem that often occurs, namely dealing with social impacts. The existence of land occupation activities by the community, both illegally and legally, on plots of land that will be built by the UNP Campus also need special attention, the result of which is in the form of collecting data and providing compensation for plants and other objects on these plots of land. Efforts to provide compensation to the community cannot be implemented immediately by the UNP Campus. There are efforts or stages that must be followed by referring to applicable laws and regulations so that the provision of compensation has a clear legal basis.

**Keywords : Land Acquisition, UNP Campus, Form and Amount of Compensation for Losses.**